PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PROSES BISNIS

DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN

REGULASI

1. Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang Undang No 02 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
3. Undang Undang No 03 Tahun 1992 tentang Jamsostek
4. Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

Tugas Pokok dan Fungsi DISNAKER

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2016

Tugas

Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi

Fungsi

1. Penyusunan perencanaan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
2. Pelaksanaan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
4. Pelaksanaan Norma Standart Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standart Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
7. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

DUKUNGAN KINERJA DINAS PADA RPJMD

VISI
TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

MISI 5	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL	MENINGKATNYA PENDUDUK YANG BEKERJA	Persentase Penduduk yang Bekerja	Meningkatnya Penempatan Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
			Meningkatnya Perlindungan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
				Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
			Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)

PROSES BISNIS DISNAKER

PROSES

PROSES BISNIS MANAJEMEN

- PENGELOLAAN KINERJA DAN ANGGARAN
- KEPATUHAN INTERNAL
- KEPATUHAN RESIKO

PROSES BISNIS INTI

- Meningkatnya Penempatan Kerja
- Meningkatnya Perlindungan Pekerja
- Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

PROSES BISNIS PENDUKUNG

- Perundang Undangan yang Berlaku
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten Peraturan
- Perencanaan yang Baik
- Ketersediaan Sarana & Prasarana serta Teknologi Informasi
- Ketersediaan Anggaran yang Cukup

TUJUAN

Meningkatnya Penduduk yang Bekerja

HASIL/ OUTPUT
Penduduk yang Bekerja

MANFAAT/ BENEFIT
MENURUNNYA TPT

Pengelolaan Resiko

Resiko : Menurunnya Penduduk yang bekerja
Penyebab : Menurunnya Kompetensi Calon Tenaga Kerja
Dampak : Menurunnya Kesempatan Kerja
Pengendalian : Pelatihan untuk Calon Tenaga Kerja, Pemagangan dan Bursa Kerja/Job Fair
Rencana pengendalian lanjutan : Peningkatan BLK, peningkatan Pemagangan dan Peningkatan Bursa Kerja/Job Fair

PROSES BISNIS MANAJEMEN

Pengelolaan Kinerja dan Anggaran :

Menyelaraskan visi dan misi sesuai dengan Renstra.

Dalam Pengelolaan Kinerja DISNAKER selalu berpedoman pada indikator indikator yang sudah ditetapkan. Pengelolaan Kinerja juga menyentuh aspek kepatuhan Internal dan Pengelolaan Resiko

Kepatuhan Internal :

Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai

Tupoksi dan SOP yang berlaku

Pengelolaan Resiko :

Memaksimalkan pencapaian tujuan dengan jalan merencanakan solusi sesuai dengan permasalahan yang mungkin muncul

PERENCANAAN KEGIATAN

1. Penyelenggaraan Forum OPD
2. Input Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Penyusunan KUA / PPAS (DISNAKER)
4. Menyusun RKA

PELAPORAN

JENIS PELAPORAN :

1. Laporan Keuangan Semester
2. Laporan Keuangan Akhir Tahun
4. LKPJ Bupati
5. LKjIP
6. LPPD
7. Input Laporan Fisik dan Keuangan

Proses Bisnis Pendukung

Proses Pendukung dalam Pelaksanaan Operasional pada Dinas Tenaga Kerja:

- Peraturan Perundang Undangan meliputi Tupoksi Organisasi
- SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai)
- Ketersediaan Sarana & Prasarana serta Teknologi Informasi
- Perencanaan yang Baik
- Ketersediaan Anggaran yang Cukup

PROSES BISNIS

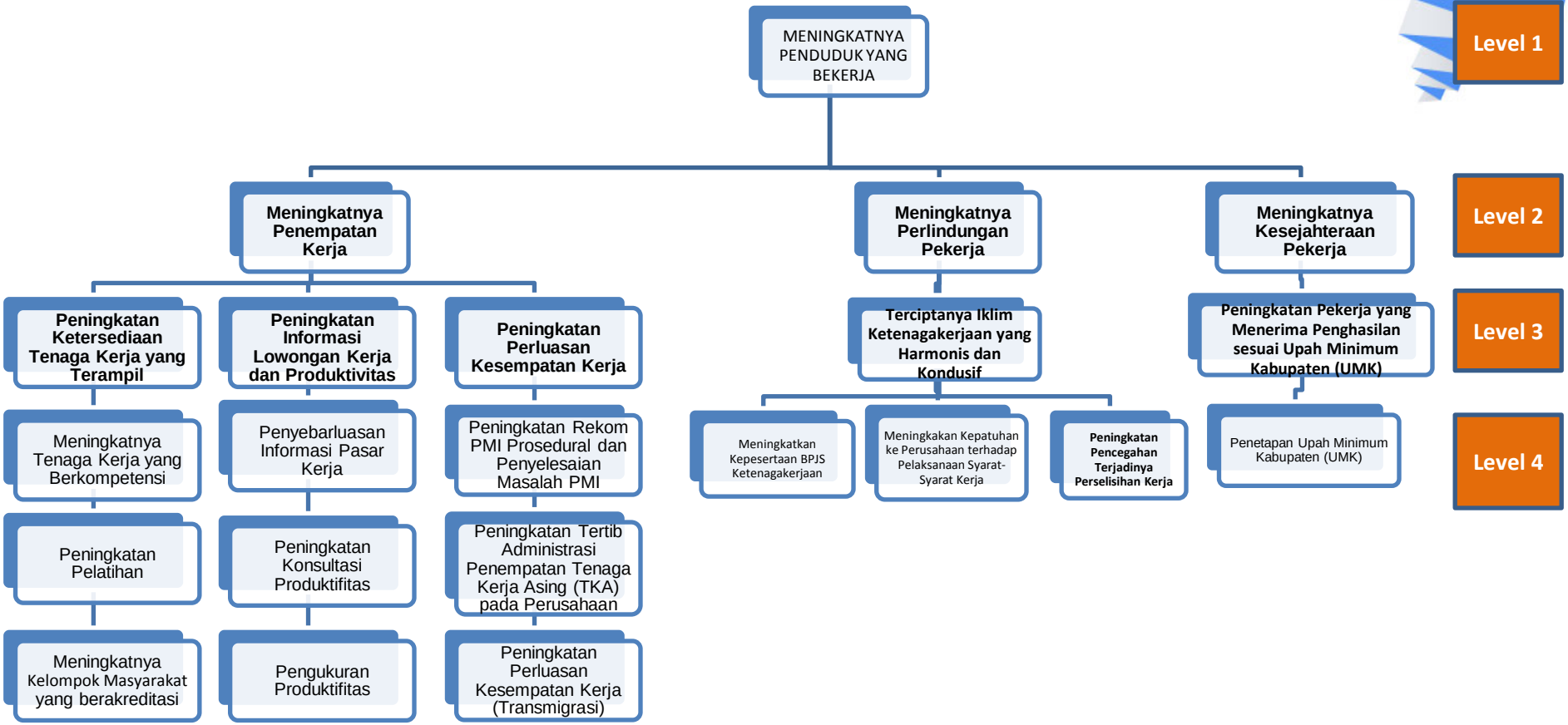

PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Meningkatnya Penempatan Kerja

Peningkatan Ketersediaan Tenaga Kerja yang Terampil

- Sosialisasi Standart Persyaratan Kelompok Masyarakat
  - Pembinaan Kelompok Masyarakat
  - Monitoring Kegiatan Kelompok Masyarakat
- Koordinasi dengan Stakholder Terkait
  - Sosialisasi dan Publikasi Pelatihan
  - Evaluasi Pelatihan
- Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi
  - Koordinasi dengan Lembaga Sertifikat Profesi (LSP)
  - Evaluasi Hasil Kompetensi

PROSES BISNIS ⟷ **SOTK**

Bidang Pelatihan Kerja

- Seksi Kelembagaan Pelatihan
- Seksi Penyelenggaraan Pelatihan
- Seksi Sertifikasi Kompetensi

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Seksi Kelembagaan Pelatihan	Seksi Penyelenggaraan Pelatihan	Seksi Sertifikasi Kompetensi
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja Melalui Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi

PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Meningkatnya Penempatan Kerja

PROSES BISNIS ⟷ **SOTK**

Peningkatan Informasi Lowongan Kerja dan produktifitas

- Percepatan Pendistribusian Informasi Lowongan Kerja
  - Peningkatan SDM Pelayanan IPK dan SDM BKK SMK
    - Fasilitasi Job Marker Fair (JMF) , Job Market Mini (SMK) dan Peningkatan SDM BKK SMK
- Fasilitasi Bimbingan 5R (Rajin, Rawat , Rapi, Resik &Ringkas)
  - Fasilitasi Bimbingan Managerial
    - Peningkatan Pembinaan Ekonomi Produktif
- Sosialisasi Instrumen Produktifitas
  - Monitoring Produktifitas
    - Survey Peningkatan Produktifitas

BIDANG INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

- **Seksi Informasi Pasar Kerja**
- **Seksi Konsultasi Produktifitas**
- **Seksi Pengukuran dan Analisis Produktifitas**

Program Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Penyebarluasan Informasi Lowongan Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri ✓	Bimbingan dan Monev Peningkatan Produktivitas SDM dalam Perusahaan ✓	Pengukuran Produktivitas Individu Tenaga Kerja Perusahaan dan monitoring ✓
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja Melalui Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) ✓	Bimbingan Konsultasi Managerial dan Monev Siswa Eks BLK ✓	Pendampingan Magang Kerja Siswa Eks BLK ✓

PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Meningkatnya Penempatan Kerja

Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tata Cara Penggunaan TKA di Perusahaan
  - Koordinasi dengan Tim PORA (Pengawasan Orang Asing)
    - Monitoring Penempatan TKA di Perusahaan
- Pelayanan Rekom PMI
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pelaksanaan PMI
    - Fasilitasi Pemulangan PMI Bermasalah dan Penyelesaian Administrasi Asuransi
      - Pemberdayaan Keluarga PMI dan PMI Purna
      - Penyuluhan PMI Sebelum Pemberangkatan
- Kerjasama Antar Daerah Penempatan Calon Transmigran
  - Peningkatan Ketrampilan Calon Transmigran
    - Monitoring Transmigran

PROSES BISNIS ⟷ **SOTK**

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

- Seksi Penempatan Tenaga Kerja
- Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri
- Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi

Program Peningkatan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja		Program Transmigrasi Regional
Monitoring Keberadaan TKA dan Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan ✓	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan CTKI Bekerja di Luar Negeri ✓	Pelatihan Transmigrasi Regional ✓
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) ✓	Fasilitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna ✓	Penempatan dan Pemberangkatan Transmigrasi ✓
	Bantuan pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Legal yang Meninggal atau Kecelakaan Kerja di Luar Negeri ✓	

PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN

PROSES BISNIS ⇔ SOTK

MENINGKATNYA PENDUDUK YANG BEKERJA

Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

- Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
  - Survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak)
    - Koordinasi Dengan Dewan Pengupahan
      - Sosialisasi UMK

Meningkatnya Perlindungan Pekerja

- Sosialisasi Peningkatkan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
  - Pembinaan Kepesertaan BPJS ke perusahaan
    - Monitoring Kepesertaan BPJS
- Sosialisasi PP/PKB ,LKS Bipartit dan LKS Tripartit
  - Koordinasi LKS Tripartit
    - Monitoring Kegiatan LKS
- Sosialisasi Peraturan Peraturan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)
  - Koordinasi Penyelesaian Perselisihan Kerja
    - Monitoring Tindaklanjut Penyelesaian Perselisihan Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial tenaga Kerja
- Seksi Persyaratan Kerja
- Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial Tenaga Kerja

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial (BPJS) di Perusahaan ✓	Koordinasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS-Tripartit) ✓	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial ✓
Sinergitas Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ✓	Penyuluhan Pembuatan PP atau PKB (Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama) dan Pembentukan LKS (Lembaga Kerjasama) Bipartit di Perusahaan ✓	
Penyusunan, Penetapan dan Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lamongan ✓		

EVALUASI PROSES BISNIS

1. Sudah berkesinambungan antara program dengan peta proses bisnis pada 4 Bidang (Bidang Pelatihan Kerja, Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja)
2. Sudah berkesinambungan antara proses bisnis dengan SOTK yang ada
3. Pada Tahun 2020 akan dilaksanakan 35 kegiatan dari 38 kegiatan di Tahun 2019 sehingga ada efisiensi 3 kegiatan.

`

TERIMA KASIH

MAJU, PRODUKTIF, KOMPETITIF